

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT; SEBUAH MODEL AUDIT SOSIAL MULTISTAKEHOLDER

Teuku Zulyadi

College of Public Administration, Huazhong University Of Science And
Technology, China
teuku.zulyadi@gmail.com

Abstrak

Program nasional yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah merupakan persoalan yang kompleks. Panjangnya birokrasi dan terlibatnya banyak pihak memiliki kekerungan tersendiri, seperti tumpang tindihnya aturan pusat dan daerah. Masalah lain akan muncul yaitu lepas tangan para pihak, sehingga publik tidak mengetahui secara pasti pangkal masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep audit sosial yang melibatkan para pihak dalam proses pembangunan. Audit sosial adalah bentuk partisipasi masyarakat yang menyeluruh untuk mengukur akuntabilitas dan integritas program pemerintah. Penelitian ini fokus kepada alur program yang meliputi transfer anggaran, distribusi, pelaporan dan mekanisme komplain. Lebih detail, menelaah pada ketersediaan aturan, pelaksanaan program dan akses masyarakat. Konsep ini tepat dilakukan untuk menguji kebijakan pemerintah pada program bantuan sosial bagi semua level kelompok masyarakat. Pemetaan masalah dan dialog untuk menemukan solusi bersama merupakan kelebihan dari konsep audit sosial ini. Kajian dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan pada tools audit sosial program pengembangan sistem integritas dan proses akuntabilitas dari anggaran pemerintah pada sektor pendidikan, pertanian dan kesejahteraan sosial LSM Pattiro.

Kata kunci; kebijakan publik, audit sosial, multistakeholder

Abstrack

National programs involving central and local government are complex issues. The length of bureaucracy and the involvement of many parties have its own independence, such as overlapping central and regional rules. Another problem will arise that is loosening the hands of the parties, so the public does not know for sure the base of the problem. This study aims to examine the concept of social audit involving the parties in the development process. Social audit is a form of broad community participation to measure the accountability and integrity of government programs. This study focuses on the program flow that includes budget transfers, distribution, reporting and complaint mechanisms. More details, reviewing the availability of rules, program implementation and community access. This concept is appropriate to test government policy on social assistance programs for all levels of community groups. Problem mapping and dialogue to find common solutions are the advantages of this social audit concept. The study was conducted by literature study approach on social audit tools of integrity system development program and accountability process from government budget on education sector, agriculture and social welfare of Pattiro NGO.

Keyword; public policy, social audit, multistakeholder

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik didarat maupun dilautan. Kekayaan lain juga meliputi keberadaan manusia sebagai warga negara. Kebudayaan yang berbeda dari tiap daerah menggambarkan keragaman indonesia sebagai negara kesatuan. Luasnya wilayah dan geografi yang berbeda sekaligus tantangan tersendiri dalam mengisi pembangunan disegala bidang.

Pemerintah sedang mengenjot pembangunan terutama dari sisi infrastruktur untuk seluruh wilayah republik indonesia. Jalan dan jembatan menjadi fokus utama dengan tujuan memperpendek arus transportasi masyarakat sehingga roda ekonomi terus berputar untuk seluruh penjuru tanah air. Anggaran besar-besaran dikucurkan untuk mendukung terlaksananya program tersebut termasuk mengundang investasi asing.

Pembangunan akan berjalan dengan baik dan dirasakan manfaat oleh warga jika pemerintah mampu mengkomunikasikan sehingga apapun yang dirancang oleh pemerintah tersampaikan dengan tepat sasaran. Peran serta masyarakat sangat penting dalam menentukan arah pembangunan. Kebutuhan masyarakat akan sejalan dengan visi dan misi pemerintah itu sendiri.

Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan dan masyarakat sebagai sasaran membutuhkan media dan cara komunikasi yang efektif. Komunikasi dua arah sangatlah diperlukan dalam menunjang setiap kegiatan pembangunan. Disamping media, pelaku komunikasi juga dituntut untuk memiliki skil khusus sehingga setiap pesan dengan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Dalam kontek pemberdayaan masyarakat, warga tidak hanya menjadi sasaran/objek dari pembangunan itu sendiri. Namun, bisa menjadi sebagai pelaku pembangunan sehingga mereka bisa menikmati hasil dan menjaga keberadaan pembangunan. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh warga adalah melakukan audit sosial. Dimana, dalam melakukan audit ini mereka terlibat langsung dalam pemantauan tahapan-tahapan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan syarat mutlak bagi negara demokratis. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi kebijakan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Audit sosial adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan

partisipasi masyarakat secara luas dalam rangka menilai, menyikapi dan mengevaluasi sebuah kebijakan atau penyelenggaraan negara . Audit sosial merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan demokratis. Audit sosial bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan dampak pelaksanaan program pemerintah serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Inti dari Sosial Audit adalah menyediakan instrumen bagi masyarakat untuk mengukur dampak dari tujuan sebuah program/proyek/kegiatan. Dilakukan secara sistematis dan reguler sehingga berguna bagi seluruh pemangku kepentingan. (www.sloka.or.id).

Nasution (1996) sebagaimana dikutip oleh Woro mengatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas, dengan tujuan agar masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan. Sedangkan dalam arti yang luas, komunikasi pembangunann meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Heterogenitas Indonesia yang sangat tinggi, budaya, kearifan lokal masih kuat, tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran akan teknologi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi komunikasi pembangunan. Komunikasi langsung merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengurangi persoalan-persoalan baik sosial maupun lainnya.

Bukan hanya cara berkomunikasi namun juga alat yang digunakan juga sangat berpengaruh dalam menyusun partisipasi masyarakat sehingga komunikasi dua arah menjadi lebih dinamis. Alat sekaligus alat peraga akan menjadi acuan bagi kedua belah pihak dalam membangun komunikasi. Alat ini juga menjadi pedoman alat ukur untuk melaksanakan audit sosial multistakeholder.

Kajian ini menawarkan sebuah konsep audit sosial yang melibatkan banyak pihak. Sangat tepat untuk menguji program-program pembangunan sosial pemerintah, seperti bantuan beras miskin, bantuan sosial pupuk bersubsidi dan lainnya.

B. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka, penulisan ini merujuk kepada tulisan yang berhubungan dengan komunikasi pembangunan dan audit sosial. Dua penjelasan ini sangat dekat dengan konsep komunikasi pembangunan masyarakat; sebuah konsep audit sosial multistakeholder.

1. Komunikasi Pembangunan

Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam pembangunan. Everett M. Rogers (1985) dalam sitompul (2002) menyatakan bahwa, secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Pada bagian lain Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial.

Lebih detail Sitompul (2002) mengatakan pembangunan merupakan proses, yang penekanannya pada keselarasan antara aspek kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Jika dilihat dari segi ilmu komunikasi yang juga mempelajari masalah proses, yaitu proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk merubah sikap, pendapat dan perilakunya. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya melibatkan minimal tiga komponen, yakni komunikator pembangunan, bisa aparat pemerintah ataupun masyarakat, pesan pembangunan yang berisi ide-ide atau pun program-program pembangunan, dan komunikan pembangunan, yaitu masyarakat luas, baik penduduk desa atau kota yang menjadi sasaran pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan di Indonesia adalah rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia, harus bersifat pragmatik yaitu suatu pola yang membangkitkan inovasi bagi masa kini dan yang akan datang. Dalam hal ini tentunya fungsi komunikasi harus berada di garis depan untuk merubah sikap dan perilaku manusia Indonesia sebagai pemeran utama pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan.

Sementara Amanah (2010) menulis yang menjadi stakeholder dalam Komunikasi Pembangunan Masyarakat Pesisir yang merupakan sistem sosial, sehingga framework CATWOE relevan dengan proses transformasi masyarakat pesisir ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pihak terkait yang dapat komunikasi pembangunan berorientasi pemberdayaan meliputi:

- *Customers*: Masyarakat pesisir termasuk nelayan dan anggota keluarganya,
- *Actors*: Pemuka masyarakat, agen pembaharu, penyuluh, ketua dan anggota kelompok nelayan,
- *Transformation*: proses perubahan berupa proses komunikasi pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan martabat masyarakat pesisir, seperti kegiatan penguatan kelembagaan lokal (seperti lembaga pemasaran, kelompok nelayan), pengembangan kapasitas sumberdaya manusia setempat, pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan terpadu dan lain-lain.
- *Welstanchaung* = worldview: pemahaman terhadap cara pandang, nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat pesisir, dan dihargai sebagai aset masyarakat setempat.
- *Owners*: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pemerintahan desa dan kecamatan dan instansi terkait lainnya yang berfungsi mengembangkan masyarakat setempat
- *Environment*: kondisi lingkungan setempat perlu diperhatikan seperti kebijakan lokal apakah mendukung atau tidak terhadap program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sebagai sebuah sistem sosial, masyarakat pesisir tentunya memiliki struktur sosial tertentu, dan dikenalnya status dan peran pada tiap anggota masyarakat. Strategi komunikasi pembangunan pada masyarakat bersifat spesifik untuk tiap wilayah, setiap upaya perubahan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti masalah sosial ekonomi, kondisi fisik lingkungan (sumberdaya alam), dan sumberdaya manusia secara umum (termasuk agen pembaharu). Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi pembangunan berubah-ubah dan harus diantisipasi secepatnya. Perubahan merupakan proses alamiah yang tidak bisa dihindari, dan harus terjadi pada sesuatu, individu atau masyarakat sebagai reaksi atau adaptasi pada kondisi yang dihadapi.

Azman (2016) mengungkapkan perusahaan yang akan memperbaiki atau meningkatkan citra positif di mata masyarakat sebelum merancang program kerja juga perlu melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri ini dapat dilakukan dengan berbagaimacam cara, di antaranya dengan melihat pemberitaan di berbagai media massa, media sosial dan media lainnya, selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan penelitian baik formal maupun informal sehingga perusahaan tersebut dapat mengetahui kondisi dan posisi citranya seperti apa dalam masyarakat. Sehingga selanjutnya baru menentukan tindakan yang akan dilakukan.

Lebih lanjut azman (2016) menulis Tidak semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh lembaga itu bisa dilakukan/ diwakili oleh PR/Humas. Banyak hal tertentu komunikasi itu harus dilakukan oleh pimpinan langsung, baik untuk publik internal, maupun untuk publik eksternal. Kelemahan dalam kemampuan berkomunikasi dengan publik bisa menjadi dampak/gagalnya citra yang akan dibangun. Seorang pemimpin yang harus memimpin bawahannya di perusahaan ataupun instansi perusahaan akan sangat intens berkomunikasi, terlebih kepada publik eksternalnya sangat dibutuhkan gaya komunikasi yang bisa membangun keakraban dan kepercayaan. Akan sangat sulit membangun hubungan yang harmonis, dinamis, saling menghargai, saling percaya, transparan dan saling menguntungkan kalau seorang pemimpin punya karakter

komunikasi seperti Hancock bersifat dingin kurang menghargai orang-orang di sekelilingnya.

2. Audit Sosial

Suharto (2008) menyebutkan audit lebih dikenal sebagai sebuah asesmen dan evaluasi yang melibatkan pengumpulan informasi mengenai sistem dan laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Audit seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang kompeten, independen dan objektif yang dikenal sebagai auditor atau akuntan. Auditor internal adalah mereka yang menjadi pegawai sebuah perusahaan yang bertugas mengaudit sistem kontrol internal perusahaan tersebut.

Sedangkan auditor eksternal merupakan staf independent yang ditunjuk oleh lembaga audit (auditing firm) untuk mengaudit laporan-laporan keuangan dari kliennya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Namun demikian, saat ini audit seringkali tidak hanya mencakup pengumpulan informasi tentang keuangan perusahaan, melainkan pula aspek lingkungan dan bahkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Para pekerja sosial (social worker), konsultan atau analis kebijakan biasanya melakukan audit sosial ini. Menurut Graham Boyd (1998: 1) yang dikutip oleh Suharto (2008), audit sosial adalah: *A process that enables an organisation to assess and demonstrate its social, economic, and environmental benefits and limitations. It is a way of measuring the extent to which an organisation lives up to the shared values and objectives it has committed to. Social auditing provides an assessment of the impact of an organisation's non-financial objectives through systematically and regularly monitoring its performance and the views of its stakeholders.*

Deegan (2004) seperti dikutip oleh Suryana (2011) mengungkapkan bahwa audit sosial adalah bagian penting dari audit sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat. Hasil audit sosial digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan sosial perusahaan dan sebagai dasar untuk kegiatan dialog dengan masyarakat.

Artinya, audit sosial tidak hanya berguna dalam penerapan komunikasi pembangunan negara dan masyarakat, namun juga sangat penting untuk sebuah perusahaan yang berada ditengah-tengah masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk audit sosial adalah metode baru dalam membangun hubungan baik sosial maupun hubungan kerja dalam rangka menjalankan konsep-konsep pembangunan.

Dalam pendampingan masyarakat, audit sosial menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Karsidi (2002) mengatakan konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Aktifitas pemberdayaan masyarakat perlu pendampingan yang serius dengan tahapan-tahapan yang mengarah kepada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat itu sendiri. Usaha ini turut disempurnakan dengan advokasi sosial pendampingan masyarakat. Makinuddin & Sasonko (2006) seperti dikutip oleh Zulyadi (2014) Ada dua unsur penting untuk membangun konsep advokasi di luar batas pengertian advokasi sebagai proses litigasi dan perubahan kebijakan. Pertama, advokasi harus ditujukan untuk membela dan meringankan beban kelompok miskin dan pinggiran akibat salah urus negara, tujuan yang seharusnya berorientasi pada perubahan sosial (social transformation). Kedua, advokasi harus dapat dijadikan untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakat korban untuk menentukan orientasi, strategi dan merefleksi perubahan berbasis pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Dua unsur itu yang belum ada dalam konsep advokasi sebagai alat untuk mengubah kebijakan maupun advokasi sebagai proses pembelaan di pengadilan.

Dengan demikian, advokasi dan audit sosial merupakan kegiatan utama untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Aktifitas ini dituntut untuk melaksanakan pendampingan selaligus pendidikan tentang seluk-beluk program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

D. Pembahasan; Model Audit Sosial Multistakeholder

Pattiro (2011) dalam buku manual audit sosial menyebutkan bahwa audit sosial merupakan mekanisme inovatif yang dapat menciptakan kondisi untuk menguatkan akuntabilitas Publik. Tanpa mengetahui informasi tentang kebijakan atau regulasi dan pengetahuan tentang implementasi di lapangan, proses audit Sosial akan sulit menghasilkan penilaian yang baik.

Audit Sosial mempunyai beberapa manfaat dan fungsi, diantaranya: (a) dapat digunakan sebagai tools untuk menyediakan input kritis dan untuk melakukan penilaian manfaat program dan/atau kegiatan pemerintah untuk kesejahteraan warga negara dan (b) menilai ongkos Sosial dan mengukur tambahan manfaat Sosial sebagai hasil dari implementasi program. Kinerja badan pemerintah dipantau melalui beragam mekanisme dari berbagai daerah. Untuk menggali informasi tentang relevansi sosial, biaya dan manfaat kegiatan program, audit Sosial dapat digunakan untuk menyediakan input khusus untuk beberapa hak berikut:

- Memantau dampak Sosial dan kinerja program
- Menyediakan dasar untuk pembentukan strategi manajemen secara bertanggungjawab dan akuntabel.
- Memfasilitasi proses pembelajaran tentang bagaimana mengembangkan kinerja Sosial.
- Memfasilitasi manajemen strategis institusi –termasuk concern pada pengaruh dan dampak Sosial bagi organisasi dan komunitas.
- Informasikan kepada komunitas, masyarakat dan badan atau institusi lain tentang alokasi sumberdaya (waktu dan uang), mengacu pada isu akuntabilitas

Tools audit sosial adalah sebuah alat untuk mengukur, mengidentifikasi dan kemudian melakukan analisa secara silang antara aspek rantai nilai (value chain) dengan aspek integritas dan akuntabilitas program yang dituangkan dalam bentuk table atau matriks skoring dengan rentang penilaian 1 (satu) sampai 4 (empat), dengan ketentuan “semakin besar nilai skor merepresentasikan situasi yang semakin baik atau ideal”, dan sebaliknya “semakin kecil skor menggambarkan situasi yang semakin buruk atau tidak ideal”.

Pembatasan dan penentuan rentang skor hanya 1 (satu) sampai 4 (empat) didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, agar ekspektasi nilai tidak terlalu tinggi dan angka tidak diidentikan dengan justifikasi. Kedua, penggunaan skor genap dimaksudkan agar pemilihan skor tidak terjadi kecenderungan untuk memilih titik tengah –terutama pada situasi yang kurang tegas menunjukkan kondisi baik atau buruk (Pattiro, 2011). Maka pola skoring ditentukan sebagai berikut:

- 1 = kondisi yang paling tidak ideal yg mungkin terjadi
- 2 = kondisi yang kurang ideal yang mungkin terjadi
- 3 = kondisi yang cukup ideal yang mungkin terjadi
- 4 = kondisi yang paling ideal yang mungkin terjadi

1. Mengukur Rantai Nilai (Value Chain)

Audit sosial akan dilakukan untuk menilai tahapan-tahapan dalam seluruh proses penyelenggaraan program, mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pelaksanaan (implementasi lapangan) yang meliputi beberapa komponen berikut:

a. Transfers

Adalah sebuah tahapan dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di tingkat kementerian/Lembaga (K/L) melakukan transfers dana subsidi ke instansi atau lembaga di bawahnya (Service provider).

b. Distribusi

Adalah sebuah tahapan pelaksanaan utama sebuah program yaitu penyampaian atau pembagian obyek program kepada penerima manfaat secara

langsung. Distribusi melibatkan dua pihak yang berkepentingan yaitu pihak provider (penyedia layanan) dan pihak penerima manfaat.

c. Pelaporan

Adalah sebuah tahapan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan distribusi dan kegiatan lain yang mendukung proses distribusi. Pada umumnya pelaporan dilakukan oleh penyedia layanan kepada pihak pemberi transfers, yang dilakukan secara tertulis dan administrative. Dalam konteks penyelenggaraan program yang dimandatkan oleh negara, pelaporan seharusnya juga disampaikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memberikan penilaian dan juga untuk memastikan integritas pelaksanaan program pemerintah tersebut –apakah sudah tepat sasaran dan apakah laporan sesuai dengan implementasi di lapangan yang diketahui oleh masyarakat. Laporan yang diberikan berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan, secara tertulis melalui pengumuman maupun melalui pertemuan warga atau melalui medai (forum) yang tersedia.

d. Mekanisme Komplain

Adalah sebuah mekanisme, prosedur atau tata cara dimana masyarakat sebagai penerima manfaat program dapat menyampaikan keluhan, komplain, saran, dan kritik terhadap pelaksanaan program. Mekanisme komplain merupakan informasi balik (feedback) dari penerima manfaat agar program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan bisa menjadi input untuk perbaikan dalam pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang. Beberapa hal yang minimal harus ada dalam mekanisme komplain diantaranya: tempat menyampaikan komplain, penanggungjawab penerima dan menangani komplain, tata cara menyampaikan komplain, dan waktu penanganan komplain. Mekanisme komplain merupakan salah satu bentuk responsivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.

2. Mengukur Integritas dan Akuntabilitas

Integritas dan akuntabilitas yang ingin diukur dan diidentifikasi melalui Audit sosial ini akan dilakukan dengan menggunakan tiga komponen atau indikator penilaian, yaitu: (a) availabilitas, (b) enforcement, dan (c) akses. Tiga komponen atau indikator penilaian ini akan digunakan untuk menilai tingkat integritas dan akuntabilitas terhadap variable yang akan dinilai yaitu: aspek transfer, aspek distribusi, aspek pelaporan, dan aspek mekanisme komplain.

a. Availabilitas atau Ketersediaan Regulasi

Availabilitas atau ketersediaan regulasi ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengidentifikasi ketersediaan instrumen pengaturan, baik berupa peraturan dan atau kebijakan (*in law*), serta untuk mengetahui sejauhmana peraturan tersebut memadai dalam menjamin dan mengatur aspek transfer, distribusi, pelaporan dan adanya mekanisme komplain atau mekanisme penanganan pengaduan.

b. Enforcement atau Penegakan Regulasi dalam Pelaksanaan

Enforcement atau penegakan regulasi dalam pelaksanaan adalah indikator untuk mengukur dan mengidentifikasi kemampuan pelaksanaan (*in practice*) dalam menerapkan atau mengimplementasikan peraturan yang ada, yang sudah dibuat oleh oleh pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan.

Aspek Enforcement atau penegakan regulasi dalam pelaksanaan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan penyedia layanan (provider) dalam menjalankan atau melaksanakan program pemerintah.

c. Akses (Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi tentang Program)

Aspek akses yang dimaksudkan di sini adalah untuk mengukur seberapa mudah masyarakat sebagai penerima manfaat untuk memperoleh informasi tentang program di setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari tahapan transfers, distribusi, pelaporan dan ketersediaan mekanisme komplain. Akses lebih ditekankan untuk mengukur seberapa mudah penerima manfaat

mengetahui apakah sebuah program berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Selain itu, dan juga untuk mengetahui keberadaan unit penanganan pengaduan di masing-masing provider dan kemampuannya untuk pengelola dan menangani pengaduan.

E. Kesimpulan

Model audit sosial yang dikembangkan oleh LSM Pattiro melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah sebagai pelaksana program, masyarakat selaku penerima sasaran dan pihak-pihak lain yang terlibat seperti pengusaha dan lainnya. Konsep ini mengajak seluruh peserta audit untuk mengungkapkan data dan fakta secara terbuka sehingga bisa saling mengkritisi satu sama lainnya.

Model ini tidak hanya melihat sebuah program dari sisi pelaksanaannya saja, namun juga lebih detail melihat aturan baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Dengan mengetahui aturan pelaksanaan menunjukkan pemerintah membuka diri dari setiap masukan-masukan dalam perbaikan termasuk menyempurnakan aturan yang ada.

Mekanisme komplain atau cara-cara menangani aduan masyarakat menjadi pendukung utama dari sisi akuntabilitas dan integritas. Hal ini merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam mempelajari sekaligus penerima manfaat dari program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Komunikasi pembangunan dalam pelaksanaan audit sosial muncul dari diskusi secara terbuka dalam waktu dan tempat yang sama antar stakeholder. Tidak hanya itu, masing-masing pihak bisa memberikan penilaian untuk melihat permasalahan yang ada. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan lain bisa saling mengungkapkan tentang kebenaran (fakta) dan mendapat masukan/kritikan dari seluruh peserta.

Daftar Pustaka

- Amanah, S. (2010). Peran komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1).
- Azman, A. (2016). STRATEGI PUBLIC RELATIONS MEMBANGUN CITRA POSITIF DALAM FILM “HANCOCK”(Studi Terhadap Nilai-Nilai Dakwah Islam). *Jurnal Al Bayan*, 22(34).
- Fahazza Muchammad, dkk (2011). Panduan Operasional (Manual)“PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRITAS DAN PROSES AKUNTABILITAS DARI ANGGARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN, PERTANIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL” Tools Audit Sosial. PATTIRO, Jakarta
- <http://www.sloka.or.id/sosial-audit-partisipasi-warga-dalam-pengawasan-pembangunan/> diakses tanggal 26 januari 2018
- Karsidi, R. (2002). Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil.
- Sitompul, M. (2002). Konsep-konsep komunikasi pembangunan. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Sumatera Utara: USU Digital Library*.
- Suaryana, A. (2011). Implementasi akuntansi sosial dan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Suharto, E. (2008). Menggagas Standar Audit Program CSR. *Disampaikan pada*, 6.
- Woro, D., Aeni, E. N., & Istiyanto, S. B. IMPLEMENTASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP II TAHAP II) DI KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT.
- Zulyadi, T. (2014). ADVOKASI SOSIAL. *Jurnal Al Bayan*, 20(30).
- Teuku Zulyadi was born Pidie Jaya, Indonesia on July 27, 1983. Master's degree at the University of Indonesia from year 2008 until 2010. As well as lecturers UIN Ar-Raniry was also active in Pattiro (non government organization) engaged in public policy advocacy, writing books, journals and articles. Now being Ph.d student, College of Public

Administration at Huazhong University of Science and Technology,
China.